

Kerangka Acuan (ToR)

SEMINAR

**"Keberlanjutan Usaha Perkebunan di Lahan Gambut dan
Dampaknya pada Kredit Perbankan"**

Kerjasama antara:

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Wetlands International Indonesia (WII)

PENDAHULUAN

Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia kini tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik oleh pelaku usaha berskala besar maupun oleh petani kecil. Perkembangan ini didorong oleh tingginya permintaan pasar dunia (terutama oleh India, Cina dan Eropa) terhadap minyak sawit mentah (CPO). Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia dan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), meramalkan bahwa dengan bertambah luasnya lahan tanaman sawit di Indonesia (kini sekitar 13,5 juta Ha, menurut WWF-I), maka produksi CPO di 2014 bakal naik mencapai 28 juta ton. Nilai produksi ini oleh Data Oil World, diramalkan akan meningkat pada tahun 2020, menjadi 78 juta ton, dimana Indonesia akan menyumbangkan sebesar 43 juta ton dan Malaysia 23 juta ton, sisanya tersebar di Negara-negara lainnya, seperti Nigeria, Kolombia, Thailand dll).

Jika produksi CPO Indonesia pada tahun 2020, seperti diramalkan DOW akan meningkat menjadi 43 juta ton, maka ini akan mengakibatkan tingginya kebutuhan lahan, yaitu sekitar 54% dari luas lahan sawit saat ini (atau total kebutuhan lahan sawit pada 2020 diramalkan sekitar 21 juta ha). Dari mana lahan ini akan diperoleh?, kemungkinan besar akan berasal dari lahan gambut yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Luas lahan gambut Indonesia diduga seluas 21 juta Ha dan hingga saat ini, lebih dari 5 juta Ha telah dibuka, terutama untuk perkebunan sawit dan akasia (bahan baku bubur kertas).

Kelapa sawit yang pertama kali ditanam di lahan gambut Indonesia terdapat di Propinsi Riau (sekitar tahun 1990), dan tanaman tersebut kini berusia sekitar 24 tahun (atau belum ada yang mencapai siklus penanaman tahap kedua. Catatan; satu siklus tanam sawit biasanya sekitar 30 tahun). Kondisi tanaman di Riau tersebut sangat memprihatinkan, karena sekitar 66% dari total tanaman (sebanyak 510,000 pokok yang ditanam oleh perusahaan X pada lahan gambut seluas 4000 ha) telah doyong bahkan tumbang, serta 23% tidak berproduksi. Kondisi pokok sawit yang doyong dan bertumbangan juga terjadi di berbagai lokasi lahan gambut di Jambi, Sumatera selatan, Kaltim, Kalbar dan lebih parah bahkan terjadi di perkebunan sawit di Kabupaten Agam (Sumatera Barat) dimana >75% sawitnya doyong dan bahkan tumbang, serta lokasi perkebunan mengalami banjir (baik saat musim hujan, maupun musim kemarau karena air pasang dari laut).

Usaha / bisnis sawit memang sangat menggairkan, sebagai akibat tingginya permintaan pasar dunia akan CPO. Tapi keberlanjutan usaha sawit di lahan gambut perlu mendapat perhatian khusus, tidak hanya oleh para pemerhati lingkungan dan pelaku di lapangan, tapi juga oleh pihak investor maupun perbankan sebagai pemasok/pemberi modal.

Lahan gambut adalah lahan yang bersifat 'fragile' / rapuh, topografi lantai dasar lahan ini berupa cekungan (umumnya tidak jauh dari pantai) yang berisikan timbunan bahan (sampah) organik dari berbagai tumbuhan yang hidup ribuan tahun dimasa lalu. Muka air tanah (*ground water level*) di lahan gambut yang belum dibuka, berada dekat dengan (bahkan menggenangi) permukaan gambut, dan ini bersifat alami serta terjadi saat musim hujan dan kemarau. Hanya tanaman asli gambut (yang sudah beradaptasi dengan kondisi genangan seperti ini) yang dapat tumbuh di atasnya (seperti Ramin, Jelutun dan Rotan). Sedangkan kelapa sawit dan akasia, bukan merupakan tanaman yang dapat beradaptasi pada kondisi seperti ini. Akibatnya, genangan/kelebihan air harus ditiadakan, yaitu melalui pembangunan saluran/kanal-kanal yang berfungsi untuk membuang (*drainase*) air dari lahan gambut ke sungai disekitarnya. Sekali air gambut di lepaskan (di drainase), maka sifat gambut akan berubah, yaitu menjadi kering (dan mudah terbakar) dan akan mengalami subsiden (ambelas atau kempes). Laju subsiden ini bervariasi, tapi rata-rata mencapai 5 cm/tahun untuk air tanah gambut yang diturunkan hingga 70 cm di bawah permukaan. Penurunan (subsiden) tanah gambut bahkan dapat mencapai lebih dari 50 cm/tahun pada awal-awal tahun gambut dibuka. Dengan adanya subsiden, perakaran tanaman sawit akhirnya akan muncul / terekspose dan tanamannya menjadi doyong/tumbang. Selanjutnya daerah

penanaman akan menjadi lebih rendah dari lahan non-gambut di sekitarnya atau berada dibawah muka air sungai atau muka air laut. Kondisi demikian akhirnya menyebabkan tanaman sawit terendam air/banjir dalam waktu yang lama dan akhirnya tanaman menjadi busuk. Doyongnya pokok sawit ini sudah mulai tampak saat tanaman masih muda (kurang dari 5 tahun).

Selain isu subsidi dan banjir, perkebunan sawit di lahan gambut juga mengalami ancaman kekeringan dan kebakaran yang mengakibatkan lepasnya gas rumah kaca (CO₂) dan menjadi keprihatinan masyarakat dunia. Isu status lahan (*land tenure*), keanekaragaman hayati dan konflik sosial yang menjadi faktor pembatas, kini telah termuat dalam Prinsip-Kriteria RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) dan akan membatasi kegiatan-kegiatan perkebunan sawit di lahan gambut ke depan. Sehubungan dengan kompleksnya permasalahan di lahan gambut, beberapa perusahaan besar seperti MARS, Mondelez International, Unilever, Kellogg's dan Nestle bahkan telah bersepakat untuk tidak menerima CPO yang vegetasi sawitnya berasal dari/ di tanam di lahan gambut ; bahkan belakangan ini langkah serupa akan diikuti oleh Proctor & Gamble (P&C), Johnson & Johnson, Mc. Donalds and General Mills (GM).

Dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh perkebunan sawit, seperti diuraikan di atas, pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bermitra dengan Wetlands International- Indonesia (WI-I) berinisiatif untuk mengadakan seminar/dialog dengan para investor dan Perbankan di Indonesia terkait isu keberlanjutan usaha perkebunan di lahan gambut dan dampaknya terhadap kredit perbankan jangka panjang. Kegiatan ini juga mendapat respon positif dari IBCSD (*Indonesian Business Council for Sustainable Development*) yang konsen terhadap investasi yang berkelanjutan di masa mendatang (*investment for sustainable future*).

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan seminar/dialog ini bertujuan untuk:

- Menyebarkan informasi terkait kebijakan di lahan gambut diantaranya Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta kebijakan moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut yang diberlakukan oleh Presiden RI
- Menyebarkan informasi terkait isu-isu di lahan gambut dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha perkebunan di atasnya.
- Memperkaya pengetahuan pihak perbankan dalam melakukan studi kelayakan sebelum menyetujui pemberian pinjaman kepada perusahaan yang akan beroperasi di lahan gambut
- Membangun kesadaran akan resiko yang dapat ditimbulkan akibat pemberian kredit terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan yang beroperasi di lahan gambut

TARGET

Target utama yang diharapkan dapat dicapai dalam seminar ini adalah tersampainya informasi kepada pihak Perbankan terkait permasalahan lahan gambut bagi keberlanjutan usaha perkebunan di Indonesia serta dampaknya terhadap kredit yang diberikan. Secara spesifik keluaran yang diharapkan dari seminar ini adalah:

Adanya partisipasi aktif dari pihak perbankan dalam upaya membantu menyelamatkan lahan gambut di Indonesia, diantaranya dengan meninjau kembali pemberian kredit untuk investasi di lahan gambut sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia (merujuk kepada Inpres Moratorium No.6/2013)

WAKTU DAN TEMPAT

Seminar akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :Selasa, 3 Juni 2014

Tempat/alamat :Hotel J.W. Marriot Mega KuninganJakarta

Pukul : 08.30 – 17.00

PESERTA

Panitia akan mengundang kurang lebih 100 orang perwakilan bank dari masing-masing Divisi Risk Management Unit and Business Analysis serta Instansi terkait.

PENYELENGGARA

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) bermitra dengan Wetlands International- Indonesia (WII)

BAHASA PENGANTAR

Seminar akan dilaksanakan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

INFORMASI

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Kementerian Lingkungan Hidup

Asdep Urusan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

Telp/Fax. 021 – 8514771

Kontak:

Eko Pujoriyanto (085292612221) email: ekopujoriyanto@ymail.com

Dian (081806250012) email: dian188deni@gmail.com

Sri Wahyuni (081291334202) email: sri_wahyuni1390@yahoo.com

Wetlands International Indonesia (WII)

Jl. Ahmad Yani no 53 Bogor 16161

Telp. 0251-8312189

Fax. 0251-8325755

Kontak:

Telly Kurniasari (0818101328) email: telly.kurniasari@wetlands.or.id

Anggita Kalistaningsih (0251-8312189) email: admin@wetlands.or.id

